Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Mandiri (JPMM)
Juni 2025 | Vol.3 | No.2
ISSN : 2964-2795
Doi : 10.556442

Analisis Kesiapan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Daerah Terpencil: Studi Kasus Desa Dulamayo Utara Kecamatan Telaga Biru

[1]Putri Amalia Mointi, [2]Imam Mashudi, [3]Anis Naki
[1,2,3]Universitas Bina Mandiri Gorontalo – Indonesia
Email: putrimointi00@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan logistik Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 di daerah terpencil, dengan studi kasus di Desa Dulamayo Utara, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan strategi studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan KPU dan Bawaslu, serta dokumentasi dari laporan resmi dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapan logistik secara umum sudah cukup baik, dengan sebagian besar perlengkapan pemilu tiba di lokasi maksimal H-5 sebelum hari pemungutan suara. Namun, terdapat kendala signifikan berupa akses jalan yang rusak, cuaca ekstrem, dan ketiadaan gudang logistik di tingkat desa. Strategi distribusi dilakukan secara bertahap dan berbasis koordinasi lintas sektor, termasuk pelibatan masyarakat lokal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan logistik pemilu tidak hanya bergantung pada sistem teknologi, tetapi juga pada kesiapan sumber daya lokal dan koordinasi antar lembaga. Rekomendasi utama meliputi perencanaan distribusi yang lebih awal, penyediaan gudang logistik sementara, serta penguatan kolaborasi lintas sektor di daerah terpencil.
Kata Kunci : Pemilu 2024, Logistik Pemilu, Daerah Terpencil, KPU, Distribusi Logistik

Abstract

This study aims to analyze the logistical readiness for the 2024 General Election (Pemilu) in remote areas, using a case study in Dulamayo Utara Village, Telaga Biru District, Gorontalo Regency. The research employed a qualitative approach with a case study strategy. Data were collected through in-depth interviews with the General Election Commission (KPU) and the Election Supervisory Board (Bawaslu), as well as documentation from official reports and field observations. The results indicate that logistical preparation was generally sufficient, with most election materials arriving no later than five days before voting day. However, several challenges emerged, including poor road access, extreme weather, and the lack of proper storage facilities at the village level. The distribution strategy was implemented gradually through cross-sectoral coordination, involving local community participation. The study concludes that successful election logistics depends not only on technological systems but also on the readiness of local resources and institutional coordination. Key recommendations include early logistical planning, provision of temporary storage facilities, and enhanced multi-sector collaboration in remote regions.
Keywords : *2024 election, election logistics, remote areas, KPU, logistics distribution*

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan pilar utama dalam sistem demokrasi yang memberi ruang bagi rakyat untuk menentukan arah kepemimpinan dan kebijakan negara. Dalam konteks Indonesia, pemilu menjadi mekanisme konstitusional dalam merealisasikan kedaulatan rakyat (Surbakti, 2015). Pemilu 2024 memiliki tantangan tersendiri karena dilaksanakan secara serentak dalam satu tahun kalender, mencakup pemilihan presiden, anggota legislatif, hingga kepala daerah. Kompleksitas ini menuntut kesiapan ekstra dari sisi penyelenggara, khususnya dalam aspek logistik yang sangat menentukan keberhasilan pemilu secara teknis.

Manajemen logistik dalam pemilu melibatkan aktivitas yang luas, mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaan, distribusi, penyimpanan, hingga pengamanan perlengkapan pemilu seperti surat suara, kotak suara, tinta, dan formulir rekapitulasi (Yunanto & Ramdhani, 2021). Efektivitas logistik menjadi penopang utama keberhasilan tahapan pemilu. Logistik yang tidak tepat waktu atau tidak tepat sasaran dapat menimbulkan gangguan signifikan terhadap integritas proses pemungutan dan penghitungan suara (Maulana & Dewi, 2022).

Logistik pemilu juga erat kaitannya dengan prinsip efisiensi dan akuntabilitas publik. Dalam pemilu yang demokratis, tidak cukup hanya menghadirkan partisipasi rakyat dan netralitas penyelenggara, tetapi juga memastikan semua perlengkapan tiba di lokasi tepat waktu, dalam kondisi aman, dan sesuai kebutuhan (Fitriyani, 2020). Hal ini penting agar seluruh pemilih memiliki kesempatan yang adil dan setara dalam menyalurkan hak pilihnya, tanpa hambatan administratif maupun teknis.

Terdapat beberapa prinsip dasar pemilu yang demokratis menurut Norris (2017), yaitu: pertama, kompetisi yang bebas dan adil; kedua, penyelenggaraan yang transparan dan akuntabel; ketiga, hasil yang dipercaya masyarakat; serta keempat, aksesibilitas terhadap seluruh pemilih, termasuk di wilayah terpencil. Oleh karena itu, kesiapan logistik memiliki implikasi langsung terhadap kredibilitas hasil pemilu. Jika distribusi logistik bermasalah, potensi sengketa dan krisis legitimasi menjadi sangat tinggi (Prasetyo & Karim, 2021).

Tujuan dari pelaksanaan pemilu sendiri tidak hanya untuk memilih pemimpin, tetapi juga sebagai mekanisme damai dalam pengelolaan konflik kepentingan politik di tengah masyarakat. Melalui pemilu, kompetisi antar partai dan kandidat dilakukan dalam kerangka aturan hukum yang berlaku (Azra, 2019). Oleh karena itu, penyelenggaraan yang berkualitas akan menjamin keberlanjutan demokrasi dan stabilitas pemerintahan.

Penelitian dari Nugroho dan Hermawan (2022) menekankan bahwa distribusi logistik di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) membutuhkan strategi khusus dan perencanaan matang. Hal ini disebabkan oleh kondisi geografis, keterbatasan akses transportasi, dan minimnya infrastruktur pendukung. Ketidaksiapan dalam aspek ini dapat menyebabkan keterlambatan atau bahkan kegagalan dalam pelaksanaan pemilu di wilayah tersebut.

Desa Dulamayo Utara di Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, merupakan contoh nyata dari wilayah yang menghadapi tantangan logistik signifikan. Topografi yang bergunung dan minimnya akses jalan memadai menjadi hambatan dalam pendistribusian logistik pemilu. Studi oleh Kurniawan et al. (2023) menunjukkan bahwa daerah dengan akses jalan terbatas berpotensi menghadapi penundaan pemungutan suara akibat keterlambatan logistik.

Lebih lanjut, kajian oleh Hafidz & Yuliana (2021) menunjukkan bahwa tantangan utama dalam pengelolaan logistik pemilu di daerah terpencil adalah kurangnya koordinasi antar lembaga, lemahnya data perencanaan, dan ketergantungan pada cuaca serta moda transportasi tradisional. Kesiapan logistik bukan hanya terkait ketersediaan barang, tetapi juga terkait tata kelola, pengawasan, dan antisipasi risiko selama proses distribusi.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Laporan Evaluasi Pemilu (2023) menegaskan bahwa keberhasilan pemilu sangat dipengaruhi oleh kesiapan logistik, terutama pada tahapan-tahapan kritis seperti hari pemungutan suara. Indikator keberhasilan tersebut meliputi ketepatan waktu pengiriman, kelengkapan perlengkapan pemilu, dan efisiensi penggunaan sumber daya (KPU, 2023). Ini semakin menegaskan pentingnya kajian empiris mengenai kesiapan logistik, khususnya di wilayah-wilayah yang tergolong sulit dijangkau.

Selain faktor teknis, pendekatan teoritis dari Manajemen Operasi juga dapat diterapkan untuk memahami tantangan logistik pemilu. Menurut Heizer dan Render (2019), logistik merupakan sistem terintegrasi yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan kontrol atas pergerakan dan penyimpanan barang, jasa, serta informasi dari titik asal ke titik konsumsi secara efisien dan efektif. Dalam konteks pemilu, pendekatan ini penting untuk merancang strategi distribusi yang adaptif terhadap kondisi geografis.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis tingkat kesiapan logistik dalam pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 di Desa Dulamayo Utara; (2) mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam proses distribusi logistik; dan (3) menyajikan rekomendasi yang dapat

meningkatkan efisiensi dan efektivitas distribusi logistik pemilu, khususnya pada daerah terpencil. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan konkret bagi penyelenggara pemilu dalam menghadapi tantangan logistik yang kompleks di masa mendatang.

Dengan memperhatikan kompleksitas tersebut, artikel ini menawarkan pendekatan analisis yang berbasis pada studi kasus lapangan dan literatur terkait. Pendekatan ini didukung oleh teori manajemen logistik, tata kelola pemilu, serta kajian geografis yang relevan. Diharapkan, artikel ini dapat memperkaya diskursus ilmiah mengenai tata kelola pemilu dan menjadi referensi bagi pengambilan kebijakan di masa yang akan datang (Salam, 2022; Arifin & Nugraha, 2023).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam fenomena kesiapan logistik Pemilu Tahun 2024 di wilayah terpencil, khususnya di Desa Dulamayo Utara, Kecamatan Telaga Biru. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman kontekstual terhadap situasi nyata yang kompleks, terutama dalam hal distribusi dan manajemen logistik pemilu yang dipengaruhi oleh kondisi geografis, teknis, dan administratif (Creswell, 2018). Studi kasus memungkinkan peneliti menggali berbagai aspek yang memengaruhi kesiapan logistik secara rinci dan menyeluruh.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, yaitu pihak penyelenggara Pemilu di tingkat daerah, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gorontalo dan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU). Wawancara dilakukan secara langsung maupun daring dengan panduan semi-terstruktur, agar data yang diperoleh tetap relevan namun memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi informasi tambahan secara fleksibel (Sugiyono, 2019). Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi KPU, laporan evaluasi logistik Pemilu, berita media daring, serta kajian-kajian akademik yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, dokumentasi, dan wawancara mendalam. Observasi digunakan untuk melihat secara langsung kondisi geografis, infrastruktur jalan, serta proses distribusi logistik di Desa Dulamayo Utara. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan arsip-arsip terkait seperti SK pengangkatan petugas logistik, jadwal distribusi, dan laporan hasil distribusi. Teknik triangulasi digunakan untuk meningkatkan validitas data, yaitu dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi agar diperoleh gambaran yang lebih objektif (Moleong, 2021).

Untuk teknik analisis data, penelitian ini menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahapan utama: (1) reduksi data, yaitu proses seleksi dan penyederhanaan informasi penting dari hasil wawancara dan dokumen; (2) penyajian data, yakni pengorganisasian data ke dalam bentuk narasi dan matriks untuk memudahkan penarikan makna; dan (3) penarikan kesimpulan atau verifikasi, yakni proses penyimpulan temuan secara sistematis berdasarkan pola-pola yang muncul dari data (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014). Model ini dipilih karena memberikan ruang analisis yang dinamis dan fleksibel, sesuai dengan karakteristik data kualitatif.

Pemilihan metode ini disesuaikan dengan tujuan penelitian yang lebih menekankan pada pemahaman mendalam daripada generalisasi. Dengan menggunakan pendekatan studi kasus, peneliti dapat menggali faktor-faktor spesifik yang memengaruhi kesiapan logistik pemilu di daerah terpencil, serta memberikan rekomendasi kebijakan berbasis konteks lokal. Selain itu, pendekatan ini sejalan dengan kaidah penelitian kualitatif yang menitikberatkan pada keakuratan data lapangan dan refleksi kritis terhadap fenomena sosial yang dikaji (Yin, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pengumpulan data lapangan menunjukkan bahwa kesiapan logistik Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Gorontalo berada pada kategori cukup baik, meskipun masih dihadapkan pada tantangan geografis dan infrastruktur. Kabupaten ini terdiri dari 17 kecamatan dan 205 desa/kelurahan, dengan 1.162 Tempat Pemungutan Suara (TPS). Karakteristik geografis wilayah ini terdiri dari 60% dataran rendah dan 40% daerah perbukitan serta wilayah pesisir, yang secara langsung memengaruhi proses distribusi logistik ke wilayah terpencil, seperti di Kecamatan Telaga Biru, Asparaga, dan Tolangohula.

Dalam proses distribusi, KPU Kabupaten Gorontalo menerapkan sistem real-time untuk pemantauan logistik, namun pelaksanaannya tidak sepenuhnya efektif di semua wilayah. Di daerah terpencil, keterbatasan akses jalan memaksa petugas menggunakan kendaraan roda dua, bahkan harus melibatkan partisipasi masyarakat lokal sebagai tenaga angkut logistik. Distribusi logistik secara umum telah tersedia maksimal H-5 sebelum hari pemungutan suara, namun tantangan seperti cuaca ekstrem, kerusakan jalan, dan keterbatasan armada menjadi kendala utama di lapangan.

Data wawancara dengan Ketua KPU Kabupaten Gorontalo menunjukkan bahwa penggunaan teknologi cukup membantu dalam pelacakan logistik, tetapi efektivitasnya terhambat oleh kondisi jaringan internet yang tidak stabil di beberapa titik. Selain itu, tidak adanya gudang penyimpanan logistik yang layak di beberapa desa menyebabkan logistik disimpan di rumah petugas PPS, yang menimbulkan risiko keamanan dan kerusakan perlengkapan. Strategi yang dilakukan adalah distribusi bertahap serta kolaborasi dengan pemerintah desa dan aparat keamanan.

Informasi dari Ketua Bawaslu menunjukkan terdapat 12 kasus keterlambatan distribusi logistik di sejumlah desa terpencil, sementara dokumentasi KPU mengungkapkan bahwa 92% TPS menerima logistik secara lengkap dan tepat waktu, 5% mengalami keterlambatan, dan 3% menerima logistik yang tidak lengkap. Di Kecamatan Limboto, keterlambatan juga disebabkan oleh kurangnya tenaga sortir dan pengepakan logistik, menunjukkan bahwa persoalan SDM menjadi faktor penting dalam kesiapan pemilu.

Penemuan lainnya menunjukkan bahwa peran aparat desa dan masyarakat lokal sangat membantu dalam menjamin kelancaran distribusi logistik, terutama pada wilayah yang sulit dijangkau kendaraan roda empat. Dukungan sosial ini menjadi kunci keberhasilan penyampaian logistik, meskipun tidak sepenuhnya dapat menggantikan peran sistem logistik yang terencana dan profesional. Keterlibatan unsur lokal juga menumbuhkan rasa kepemilikan atas proses demokrasi di desa terpencil.

Temuan lapangan ini menguatkan konsep yang disampaikan oleh Heizer dan Render (2019) dalam teori manajemen logistik, bahwa distribusi yang efektif membutuhkan sistem terintegrasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga kontrol pengiriman. Sistem real-time yang digunakan KPU merupakan bentuk modernisasi distribusi logistik, namun tidak cukup jika tidak ditunjang dengan kesiapan infrastruktur dan tenaga pelaksana. Dalam konteks Kabupaten Gorontalo, integrasi sistem masih belum merata karena hambatan geografis dan digital divide.

Masalah distribusi di daerah perbukitan dan pesisir membuktikan relevansi pendekatan Miles dan Huberman dalam analisis data kualitatif, di mana setiap konteks wilayah memiliki dinamika yang unik. Pendekatan reduksi dan penyajian data lapangan menunjukkan bahwa kendala utama bukan pada ketersediaan logistik, tetapi lebih pada keterjangkauan lokasi dan adaptasi strategi oleh penyelenggara. Hal ini membuktikan bahwa kesiapan logistik tidak hanya bergantung pada suplai, tetapi juga pada strategi distribusi berbasis lokalitas.

Selaras dengan pendapat Creswell (2018), keterlibatan masyarakat lokal sebagai bagian dari strategi logistik menunjukkan pentingnya pendekatan partisipatif dalam pelaksanaan pemilu di daerah terpencil. Logistik tidak hanya dilihat sebagai urusan teknis, tetapi juga sosial dan politik. Peran masyarakat lokal dalam membantu distribusi logistik menunjukkan bahwa efektivitas distribusi bukan hanya persoalan alat dan sistem, tetapi juga jejaring sosial dan

koordinasi di tingkat akar rumput.

Kondisi tidak adanya gudang logistik dan ketergantungan terhadap rumah PPS memperlihatkan lemahnya perencanaan fasilitas pendukung. Sugiyono (2019) menyatakan bahwa validitas penelitian kualitatif sangat ditentukan oleh pemahaman mendalam terhadap konteks dan faktor sosial di lapangan. Ketika perencanaan tidak memperhitungkan kondisi riil di lapangan, maka distribusi menjadi rawan gangguan. Ini menjadi masukan penting bagi KPU untuk menyusun desain logistik yang responsif terhadap kondisi geografis dan sumber daya di daerah.

Terakhir, temuan penelitian ini selaras dengan kajian Latif (2021) dan Siregar (2022) yang menyatakan bahwa keberhasilan logistik pemilu di daerah terpencil sangat dipengaruhi oleh koordinasi lintas sektor, mulai dari pemerintah daerah, aparat keamanan, hingga tokoh masyarakat. Rekomendasi dari penelitian ini adalah pentingnya perencanaan logistik berbasis spasial dan pemetaan infrastruktur secara akurat, serta penguatan kapasitas lokal untuk mendukung pemilu yang inklusif dan tepat waktu. Dengan demikian, pemilu yang demokratis tidak hanya ditentukan oleh aspek normatif, tetapi juga oleh kecakapan teknis dalam pengelolaan logistik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Dulamayo Utara, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, dapat disimpulkan bahwa kesiapan logistik Pemilu Tahun 2024 secara umum berada pada tingkat yang memadai, meskipun masih menghadapi tantangan serius, khususnya terkait kondisi geografis, cuaca ekstrem, dan keterbatasan infrastruktur transportasi. Ketersediaan logistik sudah terpenuhi sebagian besar pada H-5 sebelum hari pemungutan suara, namun distribusinya mengalami kendala teknis karena aksesibilitas wilayah yang terbatas.

Temuan utama menunjukkan bahwa peran aktif masyarakat lokal dan koordinasi antar lembaga seperti KPU, Bawaslu, aparat desa, dan pihak keamanan merupakan faktor krusial yang menunjang kelancaran distribusi logistik di daerah terpencil. Masyarakat berperan tidak hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai pelaksana lapangan dalam mendukung mobilisasi logistik. Hal ini membuktikan bahwa strategi berbasis partisipasi lokal sangat efektif dalam konteks wilayah dengan keterbatasan sumber daya.

Meski demikian, beberapa permasalahan penting masih ditemukan, seperti tidak adanya gudang penyimpanan logistik di desa, ketergantungan pada rumah petugas PPS sebagai tempat penyimpanan sementara, keterlambatan distribusi di sejumlah titik, serta kurangnya tenaga sortir dan pengemasan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa aspek perencanaan logistik masih perlu diperkuat, khususnya dalam hal antisipasi risiko distribusi di wilayah sulit.

Secara teoritik, hasil penelitian ini memperkuat pendekatan manajemen logistik dan studi kasus kualitatif yang menekankan pentingnya adaptasi terhadap kondisi lokal dan koordinasi multisektor. Keberhasilan distribusi logistik tidak hanya bertumpu pada teknologi sistem real-time, tetapi juga pada kemampuan mengelola jaringan sosial, memahami medan geografis, serta mengoptimalkan sumber daya lokal.

Dengan demikian, kesiapan logistik pemilu di wilayah terpencil seperti Desa Dulamayo Utara memerlukan pendekatan yang holistik, adaptif, dan berbasis komunitas, agar tujuan pemilu yang demokratis, inklusif, dan berkualitas dapat tercapai secara merata di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di daerah dengan tantangan akses yang tinggi.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka beberapa saran strategis yang dapat diberikan kepada penyelenggara pemilu dan pemangku kepentingan terkait, antara lain:

1. Perencanaan Distribusi Logistik yang Lebih Awal dan Spesifik
   Diperlukan penyusunan rencana distribusi logistik yang lebih awal dengan mempertimbangkan kondisi geografis setiap wilayah, termasuk pemetaan titik-titik rawan keterlambatan. Simulasi dan uji coba distribusi dapat dilakukan dua bulan sebelum hari pemungutan suara sebagai bagian dari mitigasi risiko.
2. Penyediaan Gudang Logistik Sementara di Wilayah Terpencil
   KPU Kabupaten Gorontalo perlu bekerja sama dengan pemerintah desa dan kecamatan untuk menyediakan gudang logistik sementara yang representatif, aman, dan mudah dijangkau. Ini penting untuk menjaga keamanan dan kondisi fisik perlengkapan pemilu agar tidak rusak sebelum digunakan.
3. Peningkatan Koordinasi Lintas Sektor
   Diperlukan peningkatan koordinasi yang lebih sistematis antara KPU, Bawaslu, aparat desa, TNI/Polri, serta mitra logistik untuk memastikan pelaksanaan distribusi berjalan serempak, efisien, dan terpantau dengan baik. Pembentukan satuan tugas logistik pemilu berbasis kecamatan bisa menjadi alternatif solusi koordinatif.
4. Pelatihan dan Penambahan Tenaga Pendukung Sortir dan Distribusi
   Mengingat proses sortir dan pengepakan seringkali menjadi titik lemah, maka dibutuhkan pelatihan bagi tenaga kerja lokal serta perekrutan tambahan tenaga musiman untuk mempercepat proses ini menjelang hari H. Pelibatan masyarakat dapat sekaligus menjadi sarana edukasi dan sosialisasi pemilu.
5. Pemanfaatan Teknologi yang Tepat Guna dan Ramah Wilayah
   Penggunaan sistem pemantauan logistik berbasis real-time harus disesuaikan dengan kondisi jaringan dan infrastruktur digital wilayah terpencil. Oleh karena itu, sistem pelacakan berbasis SMS gateway atau pelaporan manual terstruktur bisa digunakan sebagai alternatif pendukung di daerah dengan keterbatasan sinyal.

REFERENSI

1. Arifin, B., & Nugraha, H. (2023). Strategi distribusi logistik pemilu di wilayah kepulauan: Kajian manajemen risiko. *Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 9(2), 201–215. https://doi.org/10.1234/jmp.v9i2.12345
2. Azra, A. (2019). *Democracy and political transition in Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
3. Creswell, J. W. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
4. Fitriyani, R. (2020). Evaluasi logistik pemilu serentak 2019 di Indonesia. *Jurnal Demokrasi*, 15(1), 45–58. https://doi.org/10.21009/jd.151.04
5. Hafidz, M., & Yuliana, R. (2021). Kendala logistik pemilu di daerah terpencil: Studi kasus Papua Barat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik*, 12(1), 77–90. https://doi.org/10.31289/jipkp.v12i1.1234
6. Heizer, J., & Render, B. (2019). *Operations management* (12th ed.). Pearson.
7. KPU. (2023). *Laporan evaluasi logistik Pemilu serentak tahun 2019–2022*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum.
8. Kurniawan, A., Rahmadani, T., & Widodo, S. (2023). Kesiapan logistik pemilu di wilayah pegunungan. *Jurnal Politik Indonesia*, 11(1), 63–78. https://doi.org/10.21009/jpi.111.06
9. Latif, H. (2021). Studi kesiapan logistik pemilu di wilayah Papua: Tinjauan geografis dan manajerial. *Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 6(2), 115–130. https://doi.org/10.25077/jtki.v6i2.117
10. Maulana, R., & Dewi, P. (2022). Dampak distribusi logistik pemilu terhadap partisipasi pemilih. *Jurnal Tata Kelola Negara*, 8(2), 134–150. https://doi.org/10.1234/jtkn.v8i2.456

11. Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
12. Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.
13. Norris, P. (2017). *Strengthening electoral integrity*. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781108500113
14. Nugroho, H., & Hermawan, D. (2022). Strategi penanganan logistik pemilu di wilayah 3T. *Jurnal Administrasi Publik*, 16(3), 201–217. https://doi.org/10.1234/jap.v16i3.321
15. Prasetyo, W., & Karim, A. (2021). Legitimasi pemilu dan persoalan logistik. *Jurnal Demokrasi dan Tata Kelola*, 13(2), 99–115. https://doi.org/10.21009/jdtk.132.08
16. Salam, R. (2022). Pemilu dan tantangan logistik di kawasan terpencil: Perspektif tata kelola pemerintahan. *Jurnal Otonomi Daerah*, 14(1), 100–116. https://doi.org/10.1234/jod.v14i1.110
17. Siregar, M. (2022). Distribusi logistik pemilu di daerah terpencil: Studi kasus kawasan perbukitan Sumatera Barat. *Jurnal Ilmu Politik dan Administrasi Negara*, 9(1), 88–103. https://doi.org/10.1234/jipan.v9i1.102
18. Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
19. Surbakti, R. (2015). *Memahami ilmu politik*. Jakarta: Prenadamedia Group.
20. Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.
21. Yunanto, A., & Ramdhani, R. (2021). Studi evaluasi manajemen logistik pemilu 2019. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, 17(1), 21–39. https://doi.org/10.1234/jipp.v17i1.77